

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I membahas tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Topik tentang transformasi nilai kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa sangat menarik dan penting untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, munculnya kekhawatiran oleh sebagian warga negara tentang lunturnya aktualisasi nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, misalnya budaya suku Bugis-Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan yakni “*siri’na pacce/pesse*”.

Secara leksikal, istilah *siri’na pacce/pesse* merupakan paduan kata *siri’* berarti menjaga rasa malu dan harga diri (martabat) dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan terlarang, dan kata *pacce* (Makassar)/*pesse* (Bugis) berarti kesadaran dan perasaan empati individu terhadap penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh anggota masyarakat. *Siri’na pacce/pesse* dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Bugis-Makassar, mengandung etik pembeda antara manusia dan binatang yang ditandai dengan melekatnya harga diri dan kehormatan dalam diri manusia, mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mengatur tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan harga diri dan kehormatan tersebut. *Siri’na pacce/pesse* adalah hasil proses endapan kaidah-kaidah yang diterima dan berlaku di lingkungan masyarakat, mengalami pertumbuhan berabad-abad, sehingga membudaya (Marzuki, 1995, hlm. 4).

Siri’ pernah dikaji dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Komando Daerah Kepolisian XVIII 190 bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, tanggal 11 Juli s.d 13 Juli 1977 dengan tema “Mengolah Masalah *Siri’* di Sulawesi Selatan Guna Peningkatan Ketahanan Nasional dalam Menunjang Pembangunan Nasional” telah memberikan konsep dan batasan tentang *siri’* antara lain: (1) *siri’* dalam sistem budaya sebagai pranata pertahanan

harga diri, kesusilaan, hukum serta agama yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Karena itu, *siri'* berperan sebagai regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktur dalam kebudayaan; (2) *siri'* dalam sistem sosial, yakni mendinamisasi eksistensi hubungan kekerabatan atau hubungan sosial manusia, sehingga dapat bertransmisi, bertransformasi dan *re*-interpretasi sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional. Dengan kata lain, *siri'* dapat turut serta memperkokoh Pancasila; dan (3) *siri'* dalam sistem kepribadian, adalah perwujudan konkrit akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan, keserasian, keimanan dan kesadaran untuk menjaga harkat dan martabat manusia (Moein, 1990, hlm.42). Atas dasar tiga poin tersebut, maka *siri'* dimaknai sebagai sistem sosio-kultural dan sistem kepribadian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu dan anggota masyarakat.

Menurut Hamid, dkk. (2007) terdapat empat indikator yang termuat dalam budaya *siri'na pacce/pesse*, meliputi: (a) motivasi diri yakni kesungguhan individu dalam bekerja secara maksimal dengan menggunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya; (b) timbulnya rasa malu dan bersalah yang sangat mendalam karena tidak mampu mentaati aturan yang berlaku dalam masyarakat; (c) loyalitas yakni kemampuan dalam menjaga amanat yang telah dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah diikrarkan dan (d) kejujuran yaitu keselarasan antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan sehingga selalu menjunjung tinggi kebenaran.

Adapun contoh konkret transformasi budaya *siri'na pacce/pesse* yang telah diadopsi dan dijadikan slogan dalam institusi pendidikan maupun birokrasi seperti, “aku malu” jika: (1) datang terlambat dan pulang cepat; (2) melanggar peraturan; (3) berbuat salah; (4) bekerja/belajar tidak berprestasi; (5) tugas tidak selesai tepat waktu; (6) tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan; (7) berperilaku dan berbicara tidak sopan; (8) berpakaian tidak sesuai aturan yang berlaku; (9) tidak jujur; (10) berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, pada kenyataannya slogan tersebut masih hanya sebatas konsep pemikiran semata karena belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tindakan dan perilaku yang nyata.

Meskipun di Indonesia telah ada aturan hukum yang melindungi eksistensi budaya nasional maupun lokal yakni Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Namun, kekhawatiran luntarnya aktualisasi nilai budaya *siri’na pacce/pesse* dalam praktik kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan tidak dapat dielakkan. Hal tersebut telah terkonfirmasi melalui informasi yang dimuat dalam news.detik.com (2016) bahwa, selama sepekan terakhir di wilayah Sulawesi Selatan, di sejumlah lokasi, seperti kantor Samsat, kantor Satlantas dan operasi penertiban lalu lintas, sebanyak 10 oknum anggota dan pegawai di lingkup Polri telah terbukti menerima pungutan liar dari warga masyarakat. Sementara itu, Kapolda Sul-Sel, Irjen Polisi Pudji Hartanto Iskandar (2015) mengungkapkan bahwa 70% pelaku tindak kriminal di Makassar seperti pencurian dengan menggunakan kekerasan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, adalah anak-anak yang berusia 15-17 tahun. Mereka termotivasi melakukan tindak kriminal karena persoalan ekonomi, pengangguran, dan pengaruh narkoba serta minuman keras.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hidup-matinya budaya *siri’na pacce/pesse* dipengaruhi oleh aktivitas masyarakatnya sendiri. Apabila mereka menjunjung tinggi budaya lokal, niscaya nilai budaya *siri’na pacce/pesse* akan teraktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Van Peursen (2003, hlm.124) menegaskan bahwa “kebudayaan adalah hak cipta manusia”. Komentar tersebut hendak menjelaskan bahwa tanpa manusia, tidak akan pernah ada kebudayaan, karena kebudayaan justru terletak di dalam proses aktivitas manusia dalam menjawab tantangan kehidupan. Selama ini yang banyak dikerjakan ialah kebudayaan berupa benda, sedangkan wujud kebudayaan berupa ide, gagasan, nilai yang dianggap luhur masih kurang diamalkan. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian masyarakat memahami pembangunan itu dalam arti fisik semata dan wujud kebudayaan berupa benda tersebut mudah dilihat dan dipertunjukkan. Oleh karenanya, kebudayaan itu harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan, bukan hanya yang bersifat material berupa hasil karya cipta manusia seperti, bangunan candi, prasasti, kesenian tradisional dan teknologi, melainkan yang

bersifat immaterial berupa ide-ide, gagasan, keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap luhur harus diterapkan, baik oleh individu maupun anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari demi upaya memperkokoh identitas atau jati diri bangsa.

Kedua, kehadiran globalisasi telah meningkatkan peluang terjadinya kontak antar budaya. Peran media massa sebagai wahana publik menjadi sangat strategis dalam mengkomunikasikan dialektika antara kekuatan global (modern) dan kekuatan lokal (tradisional) sehingga percampuran budaya asing dan budaya lokal tidak dapat dihindari. Era globalisasi saat ini, media massa sering terlibat aktif dalam dialog antara budaya asing dan budaya lokal, maka terjadilah suatu kondisi paradoks dalam masyarakat yakni kondisi global membawa manusia senantiasa berwawasan dan berpikir global (Kaelan, 2013, hlm. 698).

Dialog budaya yang di mediasi oleh teknologi komunikasi dan informasi merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat, dengan dalih agar dapat saling bertukar informasi maupun beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, hal itu menjadi dilematis bagi bangsa Indonesia karena muncul kekhawatiran tentang kemungkinan yang dapat terjadi yakni, (1) kemunduran kebudayaan lokal maupun nasional bangsa Indonesia akibat ketidakmampuannya menghadapi kekuatan budaya asing atau (2) memajukan kebudayaan bangsa sebab berhasil mengelola dan mengembangkan budaya lokal.

Di Indonesia, kini fenomena kebudayaan asing telah merasuki kehidupan masyarakat. Hal itu telah dikonfirmasi melalui gejala-gejala sosial yang muncul seperti gaya berpakaian gila barat oleh sebagian kaum hawa, di lansir dalam situs berita online (suaramerdeka.com, 2003 & m.detik.com, 2015) bahwa penampakan pakaian minim (*miniskirt*) dan serba ketat telah hadir di Indonesia, banyak dijumpai di beberapa kota besar terutama pada waktu *weekend*, di ruang publik seperti *mall*, *supermarket*, gedung bioskop atau perusahaan tertentu. Menurut sudut pandang psikologi klinis dan psikoterapi, Henry Wirawan dan Agustina bahwa fenomena tersebut disebabkan keinginan kaum hawa untuk berusaha beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi lebih populer serta diterima dalam kelompok sosial tertentu. Alih-alih ingin terlihat seperti masyarakat modern, tetapi

melupakan budaya lokalnya sama saja dengan membiarkan identitas dirinya hilang tergerus budaya asing.

Tak hanya persoalan gaya berpakaian, tetapi globalisasi juga turut memberikan angin segar bagi tumbuh kembangnya industri budaya barat di lingkungan masyarakat Indonesia melalui kemutakhiran teknologi informasi dan komunikasi. Ibarat “virus yang disuntikkan ke dalam tubuh dan menular secara cepat ke seluruh tubuh manusia”. Hal itu telah terkonfirmasi melalui fenomena hedonism dan materialisme pada sebagian kalangan remaja. Dampak yang paling terlihat dari pengaruh paham ini adalah gaya hidup yang glamor dan berfoya-foya (hedonisme), menjamurnya *club-club* malam, penggunaan narkoba dan maraknya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja di Indonesia.

Demikian halnya dengan populasi penyedia makanan cepat saji di Indonesia seperti Mc Donald, KFC, Alfamart dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Pemasaran dan Komunikasi McDonalds Indonesia Michael Hartono (2013) bahwa McDonald's Indonesia memiliki 142 gerai yang tersebar di kota-kota besar di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Kehadiran McDonald's di Indonesia dikhawatirkan akan mengalihkan minat dan daya tarik masyarakat untuk lebih suka mengkonsumsi makanan cepat saji dibandingkan makanan tradisional dengan proses pembuatannya yang cukup lama.

Uraian informasi tersebut, mengkonfirmasi bahwa kemajuan kebudayaan juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan itu sendiri, dalam artian bahwa secara natural, kebudayaan itu saling berkompetisi satu sama lain. Apabila budaya berkawan, maka akan semakin memperkaya khazanah budaya bangsa, begitu pula sebaliknya. Apabila budaya saling bertentangan atau bermusuhan maka salah satu budaya tersebut akan punah. Dengan kata lain, seleksi hukum alam turut mempengaruhi eksistensi kebudayaan, seperti ungkapan “budaya yang kuat akan mengalahkan budaya yang lemah”.

Ketiga, munculnya persepsi dan sikap yang keliru oleh sebagian masyarakat dalam menyikapi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, yang di istilahkan dengan gerakan *tribalisme* yaitu suatu perkembangan masyarakat yang mengarah pada fanatisme primordial, sukuisme, kesetiaan pada kelompok, etnisitas, ras,

budaya, agama, kepercayaan bahkan juga kelompok-kelompok lain termasuk profesi (Naisbitt, 1994, hlm.16-17). Hal tersebut terbukti melalui catatan-catatan peristiwa sejarah tentang meningkatnya gesekan dan ketegangan antarbudaya yang dapat menjadi sumber perdebatan potensial antar masyarakat sehingga melahirkan destabilisasi keamanan, sosio-ekonomi, ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*) seperti tragedi Poso, Madura, Sampit, Aceh dan peristiwa lainnya. Mantan Kemendagri, Gamawan Fauzi (2013) mengungkapkan bahwa selama periode 2010 hingga awal bulan September 2013 telah tercatat 351 peristiwa konflik, dimana sebagian peristiwa tersebut bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan. Penyebabnya terusiknya kebhinnekaan Indonesia tersebut ialah ketidakmampuan masyarakat memahami dan menyikapi kemajemukan bangsa. Informasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan budaya lokal bangsa tak luput dari pengaruh rentetan peristiwa konflik sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keanekaragaman budaya lokal ke arah yang positif, misalnya penerapan nilai budaya gotong royong dalam upaya membina keakraban dan memperkuat rasa solidaritas warga negara.

Keempat, kebutuhan pembangunan maupun penguatan karakter bangsa semakin mendesak. Kegelisahan tersebut semakin terkonfirmasi melalui gejala-gejala sosial yang semakin kompleks muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia, misalnya, kurangnya sikap keteladanan pejabat publik sebagaimana data yang diungkapkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (2016) mencatat total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan ialah penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran (*mark up*). Sementara itu, data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (2010) tentang laporan hasil survei pandangan masyarakat terhadap kehidupan bernegara bahwa, kompleksitas permasalahan bangsa muncul akibat: (1) kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (sekitar 89,4%); (2) degradasi budi pekerti (sekitar 89,1%); (3) hilangnya wibawa/ kepercayaan pada aparat pemerintah (sekitar 87,1%); (4) kemiskinan (sekitar 86,2%); (4) hilangnya wibawa/kepercayaan pada tokoh masyarakat (sekitar 81,2%); (5) kurangnya

kecintaan terhadap negara (sekitar 69,8 %), dan (6) pengaruh asing (sekitar 67,6%).

Kelima, memudarnya aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal, utamanya dalam lingkungan pendidikan formal. Modus pendidikan di Indonesia dianggap masih lebih berorientasi pada *transfer of knowledge* daripada *transfer of moral values* kepada peserta didik. Akibatnya, peserta didik belum sepenuhnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Hal tersebut terbukti melalui data yang diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak (2015) bahwa, jumlah kasus anak pelaku tawuran pelajar (2011-2015) telah tercatat sebanyak 292 kasus dan jumlah kasus anak pelaku kekerasan di sekolah (2011-2015) tercatat sebanyak 283 kasus. Lebih mirisnya lagi tahun 2014-2015 terdapat 17 kasus kekerasan anak yang berujung maut. Salah satu faktor penyebabnya ialah sikap saling ejek dan pukul yang terjadi secara berulang sehingga menumpuk menjadi dendam serta sebagian besar 78,3% menunjukkan bahwa anak menjadi pelaku kekerasan karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut yakni, perlunya transformasi nilai kearifan lokal dalam upaya memperkokoh karakter bangsa. Dalam konteks tersebut, transformasi dipandang sebagai usaha untuk melestarikan kearifan lokal agar tetap bertahan dan dapat dinikmati oleh generasi bangsa berikutnya sekaligus memperkuat karakter warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pemikiran tersebut telah terkonfirmasi melalui hasil riset yang dilakukan Sapriya (2007, hlm.328) mengungkap bahwa, “Faktor eksternal dalam pembangunan karakter bangsa meliputi nilai budaya, adat, tata krama, budi pekerti, nilai agama dan nilai yang baik lainnya yang dianut oleh sebuah bangsa agar bangsa tersebut memiliki nilai-nilai sebagaimana yang dimiliki oleh generasi terdahulu.” Selain itu, patut pula dipertimbangkan pendapat Alexander bahwa kebudayaan dan manusia tidaklah dapat dipisahkan, sebab manusia adalah agen kebudayaan dan kebudayaan akan tetap ada selama manusia hidup di dunia. Pandangan itu seolah ingin menjelaskan bahwa kebudayaan bukan merupakan warisan biologis melainkan tercipta melalui historis perkembangan hidup manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal memuat inovasi

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kemaslahatan bangsa (Alwasilah, dkk., 2009), karena masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya.

Tak pelak lagi, transformasi nilai kearifan lokal merupakan konsekuensi dari modernisasi. Transformasi penting dilakukan dalam upaya pengangkatan dan pengelolaan nilai budaya daerah yang luhur (*local wisdom*), menyaring dan menyerap nilai budaya asing dan menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju ke arah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Alexander mengidentifikasi bahwa proses transformasi ditandai dengan karakteristik berikut: (1) perubahan terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit; (2) tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses tersebut akan berakhir, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya; (3) komprehensif dan berkesinambungan; dan (4) perubahan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat. Komentar tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi nilai kearifan lokal tidaklah bersifat instan dan langsung jadi begitu saja, melainkan diperlukan usaha dan komitmen dari segenap bangsa Indonesia untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional maupun lokal (Pakilaran, 2006, hlm.15).

Sebagai bahan refleksi, negara Jepang telah dianggap berhasil mentransformasikan nilai kearifan lokalnya. Hal itu telah dibuktikan melalui produk-produknya yang diproduksi dalam jumlah yang besar dengan *design* yang menarik, harganya relatif murah seperti *smartphone* dan barang elektronik lainnya seperti Sony, Panasonic, Thosiba, Sharp Casio dan Fujitsu; dunia animasi kartun yang menampilkan karakter tokoh lokal, seperti Naruto, One Piece, Sinchan, Detective Conan, bahkan merambah bidang otomotif seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Kawasaki, Suzuki dan Yamaha menjadikan negara tersebut makin maju di kawasan Asia Tenggara sehingga dapat bersaing dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Keberhasilan yang telah dicapai oleh negara Jepang tidaklah terlepas dari peran pemimpin Jepang yang menyadari perlunya belajar dari kemajuan bangsa lain (Alwasilah, dkk. 2009), Namun tidaklah

semata-mata meniru, mengambil dan mengadopsi kebudayaan asing secara mentah-mentah, tetapi memadukannya dengan budaya lokal yang dimilikinya. Hal tersebut senada dengan konsep pemikiran Dewantara (2004) yang terkenal dengan istilah 3C bahwa, kemajuan budaya merupakan pengalaman dari kebudayaan itu sendiri (*continue*), tidak menutup diri terhadap budaya asing, dalam artian mengambil hal yang bermuatan positif dan membuang yang bersifat negatif (*convergence*) dan tetap menjunjung tinggi sifat-kepribadian luhur bangsa (*culture up root*) guna memperkokoh jati diri bangsa (*concentric*).

Faktor lain yang tak kalah penting yang membuat negara Jepang berhasil membangun negaranya kembali pasca perang II, dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki ialah perhatian dan komitmen pemerintah di bidang pendidikan, khususnya pendidikan moral (*sushin*) dan disiplin (*shitsuke*) yang di klaim sebagai wujud budaya lokal yang kokoh (Alwasilah, dkk. 2009), telah memberikan penyadaran kepada warga negaranya arti penting kejujuran, dedikasi, loyalitas, komitmen, harga diri dan martabat bangsa. Singkatnya, negara Jepang tetap menjunjung tinggi budaya lokalnya dengan prinsip “*think globally, act locally*”.

Fakta tersebut telah membuktikan bahwa kearifan lokal tidaklah dianggap sebagai hal yang kuno dan ketinggalan zaman, melainkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat diadaptasi dan diberdayakan demi pembangunan karakter dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, dipandang penting dan perlu mentransformasikan nilai budaya lokal dalam upaya memperkokoh identitas atau jati diri bangsa-negara yakni Pancasila.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai jati diri bangsa sekaligus juga sebagai dasar pendidikan nasional mengandung beberapa makna. Secara filosofis pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, meliputi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan. Sementara itu, secara sosio-politik menjadikan warga negara yang religius, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun individu seluruh warga negara mau dan mampu membangun watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat. Oleh karena itu, secara praksis-pedagogis dan andragogi, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan

sebagai proses belajar melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis dan berkeadilan. (Winataputra, 2008 hlm.1017). Ketiga hal tersebut, merupakan misi suci pendidikan kewarganegaraan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor “*value-based education*”, menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki “*civic intelligence*” dan “*civic participation*” serta “*civic responsibility*” sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (Winataputra, 2008).

Beragam masalah yang telah diuraikan diatas akan lebih dispesifikasikan melalui penelitian studi kasus tentang transformasi nilai budaya *siri'na pacce/pesse* di Universitas Negeri Makassar. Berdasarkan hasil penelusuran dan kajian dari beberapa literatur, maka diperoleh informasi sebagai berikut: pertama, masih terdapat persepsi yang keliru oleh sebagian mahasiswa di Kota Makassar tentang budaya *siri'na pacce/pesse*. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil riset yang dilakukan Abidin (2010) tentang “Tinjauan Psikologis Aksi Demonstrasi Anarkis Mahasiswa” bahwa faktor-faktor penyebab aksi demonstrasi yang bersifat anarkis disebabkan: (1) budaya *siri'na pacce/pesse* dikonotasikan secara sempit, yakni sebagai kekerasan dengan alasan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri. (2) adanya faktor deindividualisasi, dalam arti pada saat melakukan demonstrasi, sebagian mahasiswa menggunakan helm dan kain penutup wajah, sehingga mereka berpikir bahwa identitas mereka tidak diketahui oleh pihak kepolisian maupun pihak birokrasi kampus; (3) keterlibatan wartawan dan tindakan polisi yang dianggap kurang simpatik; (4) bergantung pada kualitas isu dan kuantitas massa demonstran.

Sementara itu, hasil riset Wahyudin (2012) tentang “perilaku kekerasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi”, mengungkapkan bahwa penyebab perilaku kekerasan mahasiswa di Kota Makassar dalam berdemonstrasi antara lain: (1) rendahnya pemahaman pihak demonstran tentang aturan berdemonstrasi; (2) dilatarbelakangi oleh motivasi intrinsik (alasan utama) seperti kesadaran terhadap tanggungjawab moral (*agen of change*), turut meramaikan, mengekspresikan pikiran dan pendapat di muka

umum, mengembangkan kemampuan intelektual, sedangkan motivasi ekstrinsik, seperti, adanya dorongan dari orang lain, ingin dikenal orang lain, dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan; (3) faktor intrinsik: kekerasan sengaja dilakukan sebagai alat agar aspirasi dapat tercapai, mahasiswa tidak memahami substansi demonstrasi, bergantung pada kualitas isu dan kuantitas massa, serta faktor deindividualisasi, sedangkan faktor ekstrinsik: pihak kepolisian yang dianggap represif, pihak ketiga sebagai provokator, pihak sasaran aksi yang tidak responsif.

Di lansir dalam media berita online, news.okezone.com bahwa pada tanggal 14 November 2014, telah terjadi aksi demo mahasiswa yang mengkritisi isu kenaikan bahan bakar minyak, namun berakhir ricuh dengan polisi. Akibatnya, Polisi menahan 46 mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang diduga sebagai pelaku aksi anarkis, 4 mahasiswa diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tak heran jika demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa tersebut justru acapkali menimbulkan antipati dari masyarakat maupun civitas akademika.

Kedua, munculnya kekhawatiran terkait fenomena tawuran antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Anggapan miring tersebut semakin menjadi-jadi tatkala terjadinya sejumlah insiden tawuran antar fakultas di kampus Universitas Negeri Makassar antara lain, pada tanggal 11 Oktober 2012, terjadi insiden yang menyedot perhatian publik, termasuk Kemendikbud, Muh. Nuh tentang informasi tawuran antar mahasiswa di kampus tersebut yakni fakultas teknik dan fakultas seni dan desain yang menewaskan dua orang mahasiswa fakultas teknik. Kemudian, pada tanggal 22 April 2015, kembali terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas teknik dan fakultas seni di kampus UNM Parang Tambung. Dalam melancarkan aksinya kedua pihak tersebut saling serang menggunakan batu dan anak panah. Bukan hanya itu, aksi kejar-kejaran mereka berlanjut hingga keluar kampus, sehingga terjadi kemacetan arus lalu lintas di jalan Daeng Tata menuju Malengkeri. Diduga aksi tawuran tersebut disebabkan karena adanya aksi penyerangan salah satu pihak mahasiswa yang terjadi di luar kampus. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2015, terjadi lagi insiden tawuran antar fakultas di Universitas Negeri Makassar yakni Fakultas Teknik dan Fakultas Seni Desain. Akibatnya, Anggota Polsek Tamalate dan personel Brimob Polda Sul-Sel datang

ke lokasi tawuran dan membubarkan kedua pihak yang terlibat perang batu tersebut. Motif tawuran tersebut belum diketahui secara jelas, namun tidak ada korban terluka yang dilaporkan dalam peristiwa ini.

Berdasarkan hasil riset, Zainuddin, dkk (2013, hlm.77) tentang “mengapa kami tawuran? tawuran dari kaca mata pelaku” mengungkapkan bahwa pelaku mengakui bahwa tawuran adalah tindakan yang tidak terpuji dan tidak seharusnya mereka lakukan. Adapun peristiwa tawuran tersebut didasari atas tiga motif: (1) karena merasa terjebak situasi tawuran; (2) ingin menunjukkan rasa solidaritas, dan; (3) karena adanya ajakan dari senior. Selain itu, ketika dan setelah tawuran, pelaku ingin membuktikan bahwa mereka solid dan kuat, serta berharap agar dihormati, membuat pihak lawan jera serta menegakkan keadilan.

Sementara itu, Hasil riset yang dilakukan oleh Jumadi (2014) mengungkap bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadi kekerasan antar mahasiswa di kota Makassar yakni:

“berkurangnya hingga hilangnya nilai-nilai yang mengikat seperti idealisme, tanggungjawab, kecerdasan intelektual dan spiritual. Pemahaman yang terkandung dalam budaya Sulawesi Selatan seperti *siri'na pacce*, sudah hampir terkikis habis, sehingga setiap aktivitas konflik di kalangan mahasiswa selalu ditanggapi dengan kekerasan, tidak diselesaikan melalui cara-cara akademik penuh dialogis dan jauh dari kekerasan, sebab ciri dari masyarakat ilmiah adalah selalu mengandalkan nalar dalam bertindak dan berperilaku.” (hlm.249)

Rentetan peristiwa tersebut, menunjukkan secara nyata bahwa ada nilai-nilai budaya *siri'na pacce/pesse* yang tercecer, terlupakan dan kurang dimanfaatkan dalam kelajuan pembangunan dewasa ini, salah satu diantaranya yakni kesadaran hukum. Hal ini dikonfirmasi melalui hasil riset Marzuki (1995) tentang budaya *siri'*, yang mengungkapkan bahwa, nilai-nilai *siri'* sesungguhnya dapat berperan sebagai penggugah (motivator) bagi warga negara guna mematuhi hukum. Nilai malu menjadikan seseorang tidak mau melakukan hal-hal tercela dan terlarang, baik menurut hukum, agama maupun sosial-budaya sedangkan nilai martabat (harga diri) menanamkan *dignity* dalam diri seseorang untuk senantiasa mematuhi hukum dan berperilaku baik serta terhormat.

Apabila mencermati kenyataan masa kini dengan hasil riset Marzuki (1995), terjadi pergeseran makna *siri'na pacce/pesse* yang sesungguhnya adalah

penyimpangan tingkah laku. Namun demikian, nilainya belum hilang dan masih tersimpan dalam tradisi budaya. Bagi Hamid (2003, hlm.ix) bahwa, “pergeseran tersebut disebabkan oleh dua faktor yakni (a) perubahan struktur sosial dan (b) perubahan pengetahuan budaya (logika dan etika). Pewarisan nilai-nilai sejak kemerdekaan tidaklah memadai sehingga terjadilah kesimpangsiuran nilai dan pergeseran makna, terutama dalam interaksi simbolik.” Pernyataan tersebut mengantarkan pada kesimpulan, bahwa perlu diadakan transformasi makna *siri’na pacce/pesse* untuk revitalisasi guna menunjang pembangunan karakter bangsa.

Bertolak dari spesifikasi permasalahan yang dikemukakan di atas, maka topik penelitian ini menjadi amat menarik dan penting untuk dikaji. Mengingat peranan kearifan lokal begitu penting bagi kehidupan bangsa, maka peneliti mengangkat judul penelitian “**Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Karakter Bangsa (Studi Kasus tentang Budaya *Siri’ Na Pacce* di Universitas Negeri Makassar)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian tersebut, nilai kearifan lokal ternyata memiliki peranan dalam memperkuat karakter bangsa. Dalam rangka mewujudkan penguatan karakter bangsa, maka karakter warga negaranya harus cerdas dan baik. Alasannya, karakter bangsa merupakan cerminan dari kolektivitas perilaku warga negara. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yakni bagaimana transformasi nilai kearifan lokal budaya *siri’na pacce/pesse* di lingkungan kampus Universitas Negeri Makassar dalam upaya memperkuat karakter bangsa?

Demi ketajaman analisis, rumusan masalah di atas dijabarkan menjadi sub-sub pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pola transformasi nilai-nilai budaya *siri’na pacce* di Universitas Negeri Makassar?
2. Bagaimana implikasi nilai-nilai budaya *siri’na pacce* yang telah bertransformasi terhadap penguatan karakter bangsa?

3. Bagaimana implikasi nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang telah bertransformasi terhadap dimensi sosio-kultural pendidikan kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang telah bertransformasi di Universitas Negeri Makassar dalam upaya memperkuat karakter bangsa.

1.3.2 Tujuan khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pola transformasi nilai-nilai budaya *siri' na pacce* di Universitas Negeri Makassar.
2. Menganalisis implikasi nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang telah bertransformasi terhadap penguatan karakter bangsa.
3. Menganalisis implikasi nilai-nilai budaya *siri' na pacce* yang telah bertransformasi terhadap dimensi sosio-kultural pendidikan kewarganegaraan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Teoretis

Hasil penelitian tentang transformasi nilai-nilai kearifan lokal budaya *siri' na pacce* diharapkan dapat memperkaya khazanah pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural, yakni membentuk warga negara yang cerdas dan baik yang bertujuan untuk memelihara nilai dan prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.4.2 Dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pimpinan universitas dalam aspek kebijakan tentang mentransformasikan nilai budaya lokal di lingkungan pendidikan tinggi, terutama bagi civitas akademika

(mahasiswa) sehingga warisan nilai budaya lokal dapat tetap lestari dan eksis pada masa kini dan mendatang.

1.4.3 Dari Segi Praktis

Hasil penelitian tentang transformasi nilai-nilai kearifan lokal budaya *siri na pacce* dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk lebih mengenal salah satu sisi jati diri masyarakat Bugis-Makassar dalam kaitan penguatan paradigma kejatidirian manusia Indonesia seutuhnya di masa mendatang dan meluruskan kembali pemahaman (persepsi) keliru dan sempit berkenaan dengan konsepsi *siri na pacce* yang dikonotasikan dengan kekerasan dan pembalasan dendam.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal Tesis

Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal tesis.

Bab II membahas kajian teoretis yang berisikan deskripsi dan analisis serta konsep peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan konsep dan kajian teori dalam beberapa sub bab antara lain: konsep budaya *siri' na pacce*, konsep dan teori transformasi, konsep dan teori kebudayaan, konsep karakter, konsep pendidikan kewarganegaraan, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pikir.

Bab III membahas metode penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain: pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, analisis data dan verifikasi data.

Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub antara lain: deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V membahas kesimpulan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam sejumlah kesimpulan, implikasi dan rekomendasi hasil penelitian.